BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-19, digunakan terutama hanya untuk maksud penerangan sebaga ganti lampu minyak dan lampu gas. Riwayat singkat perkembangan organisasi pelistrikan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat khususnya di mulai sejak tahun 1905 sampai dengan merdeka.

Tahap-tahap Perkembangan PT. PLN (Persero) :

1. Perusahaan Listrik Zaman Hindia Belanda

Pada tahun 1905 Pemerintah Hindia Belanda memberikan izin kepada *Bandoengsche Electriciteit Maattschappij* (BEM) untuk mendirikan perusahaan listrik di Indonesia yaitu Bandung, yang bertugas dalam bidang pembuatan dan pembangunan jaringan-jaringan listrik untuk kota Bandung dan sekitarnya. Tahun 1919 perusahaan BEM dihapuskan dan digabungkan dalam suatu perusahaan perseroan terbatas dengan nama *Gameenshapp Lijke Badriff En Omstrehen* (GEBEO) tepatnya pada tanggal 1Januari di Bandung dan sekitarnya.

GEBEO NV merupakan perusahaan perseroan terbatas terutama yang mengusahakan kelistrikan termasuk pendistribusian tenaga listrik. Kelistrikan untuk

kemanfaatan umum mulai ada pada saat perusahaan swasta Belanda yaitu NV NIGH yang semula bergerak di bidang gas memperluas usahanya di bidang listrik untuk manfaat umum.

Menurut berbagai keterangan yang ditemukan menyatakan bahwa cahaya listrik mulai bersinar di wilayah Indonesia pada akhir abad ke-19 pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.

Pembangunan kelistrikan di wilayah Indonesia terjadi sebagai berikut :

a) Efektifikasi di wilayah kota Batavia sekitar Tahun 1983 merupakan *Stads Bedrif* Batavia;
b) Efektifikasi di wilayah kota Medan sekitar Tahun 1903 sebagai *Stasds Bedrif* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *ElectricteitBedrif* Medan (Deli);
c) Efektifikasi di wilayah kota Surabaya kira-kira Tahun 1907 merupakan *Stads Bedrif* yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan nama *Electricteit Bedrif* Surabaya.

Tahun-tahun berikutnya menurut keterangan dari berbagai sumber yang kurang jelas kelistrikan antara lain dibangun di Palembang dalam kaitannya dengan usaha pertambangan minyak. Sedangkan di Ambon dan Makassar untuk kepentingan militer. Setelah perusahaan listrik yang berpusat di negeri Belanda didirikan beberapa wilayah di Indonesia (umumnya pembangkitan) maka distribusi atau pendistribusian tenaga listrik oleh pemerintah daerah dialihkan pada perusahaan listrik swasta.

Menurut catatan pendirian perusahaan listrik pada zaman Belanda di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Perusahaan Listrik NV NIGN yang kemudian berubah menjadi NV OGEM.

(a) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 28 tanggal 27 Juni 1913 pemberian konsensi untuk melistriki wilayah kota Batavia;

(b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 29 tanggal 1 November 1915 pemberian konsensi untuk melistriki wilayah kota Jatinegara;

(c) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 14 tanggal 17 Mei 1924 pemberian konsensi untuk melistriki wilayah kota Tangerang;

(d) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 6 November 1924 pemberian konsensi untuk melistriki wilayah kota Cirebon;

(e) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 12 tanggal 16 Juni 1927 pemberian konsensi untuk melistriki di luar wilayah kota Cirebon.

Pemberian izin beroperasi kepada NV NIGN diluar Pulau Jawa antara lain dikeluarkan untuk wilayah kota Medan kemudian secara berturut-turut menyusul wilayah Palembang, Makassar, Tanjung Karang (Lampung) dan Manado.

Keterangan yang jelas mengenai izin beroperasi kepada NV NIGN konsensi di luar Pulau Jawa tidak atau belum ditemukan tetapi menurut berbagai pendapat dan keterangan yang diperoleh untuk wilayah Palembang terjadi sebelum Tahun 1920, dan untuk wilayah lainnya terjadi setelah Tahun 1920, misalnya Medan, Tanjung Karang, Makassar, Manado, dan sebagainya.

2) Perusahaan Listrik NV ANIEM

(a) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 6 tanggal 8 Februari 1914 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Surabaya-Semarang-Yogyakarta;

(b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan surat keputusan No. 25 tanggal 9 Mei 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi berbagai wilayah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang telah dikelola oleh OGEM, ELECTRA, EMR dan EMB;

(c) Pemberian Izin beroperasi kepada NV ANIEM untuk elektrifikasi wilayah di luar Pulau Jawa antara lain; Bukittinggi, Pontianak, Ambon dan sebagainya.

3) Perusahaan NV GEBEO

Perusahaan listrik NV GEBEO merupakan usaha bersama pemerintah Jawa Barat ikut serta dengan keputusan yang dikeluarkan sebagai berikut :

(a) Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 tanggal 30 Januari 1923/1928 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Bandung dan sekitarnya (sebelum lampu gas, listrik oleh militer);

(b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 tanggal 19 Maret 1923/1928 pemberian konsensi untuk kota Bogor dan sekitarnya (sebelum lampu gas);

(c) Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 24 bulan Desember 1938, No. 21 tanggal 20 Mei 1940, No. 30 tanggal 18 Januari 1940 pemberian

konsensi untuk elektrifikasi wilayah Karesidenan dan Kabupaten seluruh propinsi Jawa Barat kecuali Cirebon dan Jakarta yang dikelola NV NIGN.

4) Perusahaan Listrik ELECTRA

(a) Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik ELECTRA dengan Surat Keputusan No. 37 tanggal 7 Juni 1915 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah kota Tulung Agung;

(b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 31 tanggal 4 September 1922 dengan Surat Keputusan No. 33 tanggal 30 Maret 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi dalam kesultanan Surakarta.

5) Perusahaan Listrik SEM

(a) Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik SEM dengan Surat Keputusan No. 15 tanggal 21 Desember 1925 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Kesultanan Surakarta;

(b) Izin beroperasi dikeluarkan dengan Surat Keputusan No. 8 tanggal 8 Januari 1937 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Kabupaten dan sebagainya, yang termasuk dalam Kesultanan Surakarta.

6) Perusahaan Listrik OJEM

Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik OJEM dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 24 Februari 1925, No. 8 tanggal 26 Desember 1925, No.

61 dan No. 62 tanggal 29 Agustus 1927, No. 16 tanggal 8 Juni 1929 untuk melistriki wilayah Karesidenan Panarukan dan beberapa Kabupaten disekitarnya.

7) Berdiri dan beroperasinya perusahaan Listrik EMR

(a) Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik NV. EMR dengan Surat Keputusan No. 12 tanggal 25 Juni 1927 pemberian konsensi untuk elektrifikasi Kota Rembang;

(b) Izin beroperasi dikeluarkan kepada perusahaan listrik NV. EMR dengan Surat Keputusan No. 8, No. 9, No. 10 tanggal 4 Maret 1929 untuk menambah konsensinya memperluas elektrifikasi di wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.

8) Berdiri dan beroperasinya perusahaan Listrik EMB

Izin beroperasinya dikeluarkan kepada perusahaan listrik NV. EMB dengan Surat Keputusan No. 31 tanggal 27 September 1939 pemberian konsensi untuk elektrifikasi wilayah Karesidenan Banyumas dan Beberapa Kabupaten disekitarnya.

2. Perusahaan Listrik Zaman Jepang

Pada masa Perang Dunia Ke-II semua perusahaan Listrik di wilayah Indonesia dengan sendirinya berada di bawah pengawasan tentara Jepang, antara lain perusahaan listrik Belanda yang berada di bawah Angkatan Darat Jepang dijadikan perusahaan listrik Jepang dengan nama sebagai berikut:

a) *Jawa Denki Jigyokoska* kantor pusat di Jakarta;

b) *Seibu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Barat;

c) *Chobu Jawa Denki Sha* di wilayah Jawa Tengah;

d) Cabang-cabang perusahaan listrik tetap seperti semula.

Dengan penguasaan tersebut, maka pimpinan perusahaan juga dipegang oleh tenaga yang didatangkan dari Jepang.

3. Perusahaan Listrik setelah Proklamasi Kemerdekaan

Pada tanggal 14 agustus 1945, Perang Dunia ke-II diakhiri dengan menyerahnya Jepang pada sekutu berarti bahwa tentara sekutu akan meduduki wilayah Indonesia yang di kuasai oleh tentara Jepang sebelum sekutu mengambil alih kekuasaan dari penguasa Jepang, Pimpinan-pimpinan Indonesia telah mendahului memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Dengan penetapan pemerintah No.1 1945 tanggal 27 Oktober 1945 merupakan hari dan tanggal yang sangat bersejarah bagi karyawan listrik yang telah diperolehnya melalui perjuangan pengambil alihan yang cukup berat dan banyak meminta pengorbanan baik yang gugur maupun cacat dan kehilangan harta bendanya, terjadi di seluruh Indonesia sebagai manifestasi perjuangan karyawan listrik ikut mengisi dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia selama revolusi kemerdekaan daerah di duduki Belanda tentunya dikuasai oleh mereka.

Setelah penyerahan kedaulatan dari pemerintah Republik Indonesia serikat yang kemudian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, perusahaan listrik yang beroperasi di Indonesia adalah perusahaan listrik asing atau Belanda, yaitu : NV

ANIEM, NV OGEM, NV GEBEO dan sebagainya kecuali pembangkit tenaga listrik yang semula Lands Waterkracgt Bedrijven (LWB) tetap dikuasai pemerinta Belanda.

a) Nasionalisme Perubahan Listrik Indonesia

   Dengan adanya Agresi Belanda I dan II, sebagaian besar perusahaan-perusahaan listrik dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pegawai yang tidak mau bekerja kemudian menggabungkan diri pada kantor jawatan listrik atau gas di daerah-daerah Republik Indonesia. Para pemuda mengajukan mosi kobarsihtentang Nasionalisasi perusahaan listrik dan gas swasta kepada Republik Indonesia No. 163 tanggal 3 Oktober tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik Bangsa asing di Indonesia, antaranya adalah GEBEO NV yang namanya diganti menjadi PLN Bandung yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Jawa Barat kecuali DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

b) Perkembangan Organisasi Hingga Sekarang

   Pada tahun 1965 struktur organiisasi perusahaan listrik Negara di seluruh wilayah Indonesia ditetapkan menjadi 14 kesatuan wilayah dengan cabang-cabang yang terdiri dari:

   - 12 PLN Eksploitasi Distribusi
   - 1 PLN Eksploitasi Pembangkitan
   - 1 PLN Gas

Pada tahun 1965 dengan peraturan PUT np.9/PRT/1964 BPU PLN di bekukan dan dengan peraturan No.1/PRT/1965 dua perusahaan listrik dan gas dipecah menjadi :

- Perusahaan Listrik Negara (PLN)
- Perusahaan Gas Negara (PGN)

Sampai saat ini PLN distribusi Jawa Barat mempunyai 15 Cabang, dan satu bengkel distribusi yang di perinci sebagai berikut :

1) Cabang Cirebon
2) Cabang Tasikmalaya
3) Cabang Cianjur
4) Cabang Sukabumi
5) Cabang Bogor
6) Cabang Banten
7) Cabang Garut
8) Cabang Purwakarta
9) Cabang Cimahi
10) Cabang Bandung
11) Cabang Majalaya
12) Cabang Bekasi
13) Cabang Depok
14) Cabang Sumedang
15) Cabang Karawang

16) Unit Pengaturan Distribusi

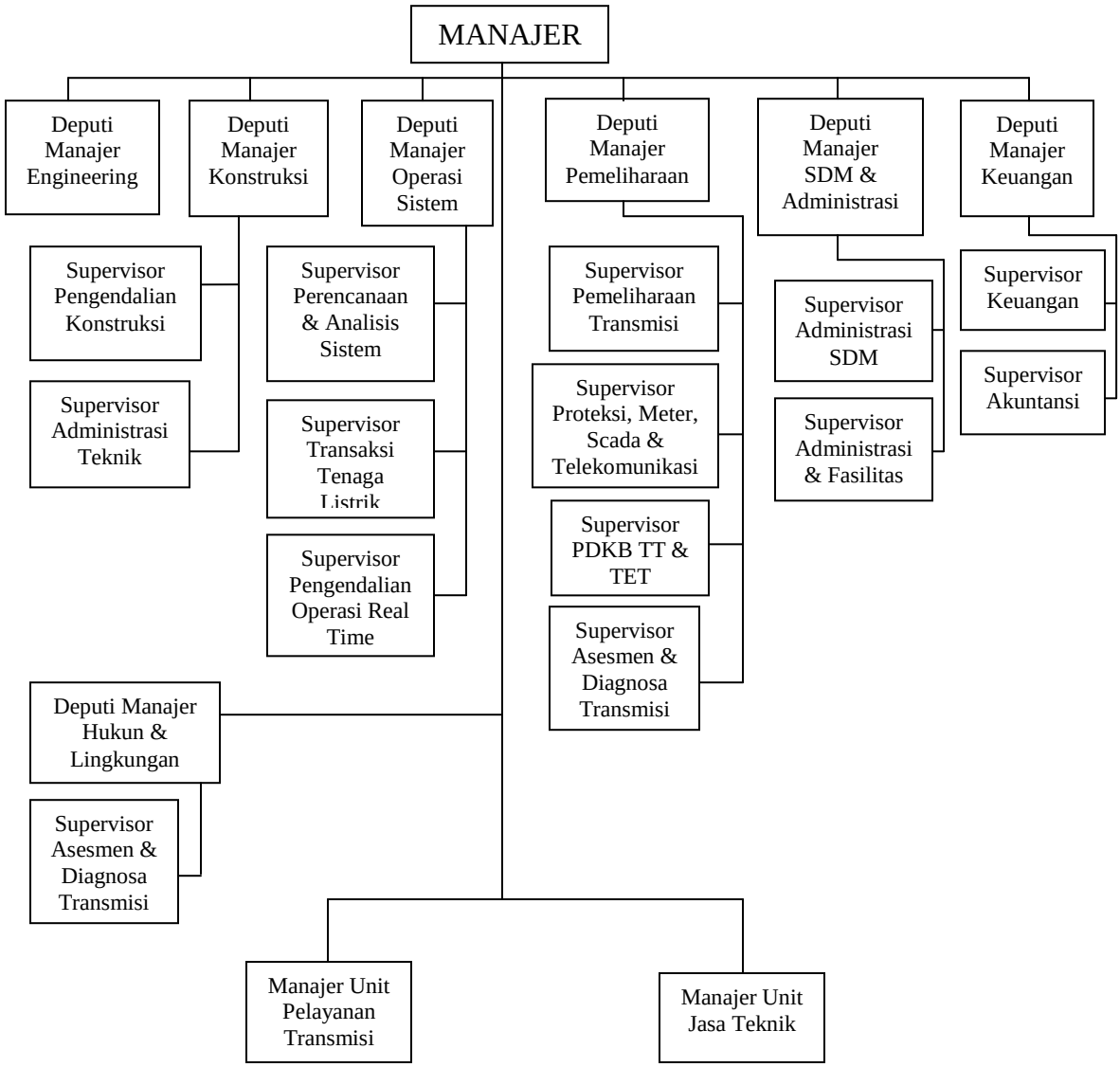
17) Kantor Distribusi

Di dalam penjelasan dan pengumuman tentang pembentukan Kabinet Pembangunan (20 Maret 1978) Perusahaan Listrik Negara yang semula bernaung di bawah Departemen Pekerjaan umum dan Tenaga istrik, dialihkan ke dalam naungan Departemen Pertambangan dan Energi.

Departemen Pertambangan energi, mengalami perubahan status dari Perusahaan Umum Negara (PERUM) Listrik Negara menjadi PT.PLN (Persero). Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah No.23 tahun 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perseroan Terbatas (Persero) yang termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 No.34, sehingga untuk Perusahaaan Umum Listri Negara Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat.

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) AREA PELAYANAN JARINGAN CIMAHI



Organisasi merupakan sistem yang saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi secara keseluruhan tidak mungkin dijalankan oleh orang tertentu saja. Organisasi dapat diibaratkan sebagai kesatuan anggota tubuh manusia yang bekerja bersama-sama sehingga fungsi tubuh manusia secara keseluruhan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Struktur organisasi menunjukkan bagaimana bagian-bagian di dalam organisasi dikoordinasikan bersama-sama melalui suatu jalur wewenang dan tanggung jawab. Struktur organisasi adalah penggambaran secara grafik yang menggambarkan struktur kerja dari suatu struktur organisasi. Struktur organisasi hanya dapat menunjukkan hubungan wewenang yang formal saja dan tidak dapat menggambarkan seberapa besar wewenang, tanggung jawab dan deskripsi pekerjaan yang terinci.

PT. PLN (Persero) menyadari akan pentingnya suatu tingkatan wewenang dan telah menyusun suatu struktur organisasi, dimana struktur organisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan unjuk kerja organisasi. Struktur organisasi di PT. PLN (Persero) telah penulis analisa. Hasil analisa struktur organisasi tersebut telah penulis rangkum pada bab ini.

Pembagian tugas atau distribusi orang-orang pada posisi tertentu yang peranan dan tanggungjawabnya satu sama lain saling memperngaruhi dalam garis hubungannya yang dinyatakan dalam struktur organisasi. Organisasi harus menampung dan menangani seluruh aktivitas perusahaan dengan di dukung oleh *job*

description yang baik. Maksud dan tujuan struktur organisasi untuk menciptakan koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antara pelaksana organisasi agar dapat mencapai tujuan perusahaan.

Struktur organisasi PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi dipimpin oleh seorang manager dan dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh beberapa supervisor, yaitu :

1. Manager

Manager membawahi dan mengkoordinasikan ketujuh deputi manager dan dibantu oleh dua orang manajer yaitu, Manajer Pelayanan Transmisi dan Manajer Unit Jasa Teknik. Unit kerja yang bertanggung jawab langsung kepada dan dibawahi Koordinasi Manager, terdiri dari :

a. Deputi Manager Enginering
b. Deputi Manager Konstruksi
c. Deputi Manager Operasi Sistem
d. Deputi Manajer Pemeliharaan
e. Deputi Manajer SDM & Administrasi
f. Deputi Manajer Keuangan.
g. Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan

2. Deputi Manager Konstruksi

Deputi Manager Konstruksi membawahi dan mengkoordinasikan 2 orang yaitu:

1. Supervisor Pengendalian Konstruksi.
2. Supervisor Admnistrasi Teknik.

3. Deputi Manager Operasi Sistem

Deputi Manager operasi Sistem dibantu oleh tiga orang Supervisor , yaitu:

1. Supervisor Perencanaan dan Analisis Sistem
2. Supervisor Transaksi Tenaga Listrik
3. Supervisor Pengendalian Operasi Real Time

4. Deputi Manager Pemeliharaan

Deputi Manager Pemeliharaan membawahi 4 orang Supervisor , yaitu:

1. Supervisor Pemeliharaan Transmisi
2. Supervisor Proteksi, Meter, Scada, & Telekomunikasi
3. Supervisor PDKB TT dan TET
4. Supervisor Assesmen dan Diagnosa Transmisi

5. Deputi Manager SDM dan Administrasi

Deputi Manajer SDM dan Administrasi membawahi dua orang Supervisor, yaitu:

1. Supervisor Sumber Daya Manusia
2. Supervisor Administrasi dan Fasilitas

6. Deputi Manajer Keuangan

Deputi Manajer Keuangan dibantu oleh dua orang Supervisor , yaitu ;

1. Supervisor Keuangan
2. Supervisor Akuntansi

7. Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan

Deputi Manajer Hukum dan Lingkungan ini hanya membawahi Supervisor Assesmen dan Diagnosa Transmisi saja.

4.1.1.3 Uraian Tugas

Deskripsi tugas adalah suatu rincian yang menunjukan posisi, tanggung jawab, fungsi dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh seorang personil mengerti di dalam suatu organisasi. Deskripsi tugas perlu dibuat supaya masing-masing personil mengerti kedudukannya di dalam organisasi. Deskripsi tugas pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Manager

Tugas pokok menager adalah sebagai berikut :

a. Menentukan kebijakan perusahaan dengan memperhatikan kebijakan yang telah digariskan Dewan Direksi PT PLN (Persero), mengkordinasikan semua bagian dalam perusahaan.
b. Merumuskan dan menetapkan rencana kerja perusahaan, memecahkan masalah-masalah yang timbul pada pelaksanaan umum perusahaan.
c. Memberikan pertanggung jawaban mengenai seluruh kegiatan perusahaan dalam bentuk laporan.
d. Pengawasan dan pengendalian investasi.
e. Mengadakan hubungan dengan pihak luar terutama mengenai hal-hal yang kebijakan pengembangan perusahaan dan kebijakan lainnya yang bersifat umum.

2. Deputi Manager keuangan

Mempunyai tujuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan anggaran operasi dan anggaran investasi, pengelolaan

RKAP, pengelolaan arus kas serta pengelolaan akuntasi untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan pendanaan dan arus kas yang akurat serta ketepatan waktu penyajian akuntansi dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan bidang keuangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan penyusunan RKAP serta revisi RKAP.
3. Melaksanakan pengontrolan alokasi anggaran sesuai RKAP untuk memastikan ketepatan pemanfaatan anggaran.
4. Mengkoordinasikan Pembuatan Laporan Realisasi RKAP serta Permohonan ajuan AT serta Permohonan tunai operasi dan investasi untuk menjamin tersedianya dana sesuai kebutuhan pembayaran.
5. Menetapkan sistem, prosedur dan tata kerja administrasi anggaran, keuangan, akuntansi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
6. Mengendalikan fungsi back up eksternal audit di regionnya untuk memastikan semua kegiatan telah sesuai peraturna yang berlaku.
7. Mengendalikan dan mengalokasikan tunai ke UJT dan UPT sesuai dengan aliran kas dan rencana kerja yang telah ditentukan.
8. Mengendalikan pembayaran kepada pihak intern dan ekstern dan memastikan bahwa pembayaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Menetapkan proyeksi pendapatan dan proyeksi laba sebagai bahan dalam pengambilan keputusan manajemen dan RKAP.
10. Merekomendasikan Laporan Pembukuan dan Lampirannya, serta Laporan Manajemen.
11. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 dilingkungannya.
12. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.
14. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

3. Supervisor keuangan

Mempunyai tujuan untuk Mengelola sub bidang keuangan dan akuntansi yang meliputi verifikasi keabsahan, kebenaran dan kelengkapan bukti transaksi sampai menjadi laporan Arus Kas dan melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut ;

1. Membuat rencana kegiatan sub bidang Keuangan.

2. Merancang penyusunan sistem, prosedur dan tata kerja keuangan untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengendalikan dan mengawasi kebutuhan & dropping tunai anggaran operasi dan investasi sesuai dengan RKAP/disbursement serta kebutuhan anggaran di luar RKAP untuk menjamin tersedianya likuiditas.
4. Memeriksa bukti penerimaan & pengeluaran kas/bank dan cek/bilyet giro kantor Region dengan bukti-bukti pendukungnya untuk mengecek kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya.
5. Memeriksa buku harian kas/bank dengan bukti pengeluaran dan penerimaan kas/bank, berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi bank kantor Region untuk mengetahui saldo harian dan memastikan saldo menurut fisik sama dengan saldo menurut buku.
6. Memeriksa daftar laporan kiriman uang, laporan arus kas serta bukti pendukungnya, dan laporan pajak-pajak untuk laporan ke KPP setempat.
7. Mengusulkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sub bidang keuangan dan akuntansi untuk bahan pengambilan keputusan manajemen.
8. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 dilingkungannya.
9. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.

10. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

4. Supervisor Akuntansi

Adapun tujuannya yaitu untuk mengelola sub bidang keuangan dan akuntansi yang meliputi verifikasi keabsahan, kebenaran dan kelengkapan bukti transaksi dan melakukan perhitungan, pajak serta proses akuntansi sampai menjadi laporan keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan.

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut diatas, manager keuangan mempunyai tugas utama sebagai berikut :

1. Membuat rencana kegiatan sub bidang Keuangan dan Akuntansi.
2. Merancang penyusunan sistem, prosedur dan tata kerja keuangan dan akuntansi untuk pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.
3. Memeriksa bukti penerimaan & pengeluaran kas/bank kantor dengan bukti-bukti pendukungnya untuk mengecek kebenaran, kelengkapan dan keabsahannya.
4. Memeriksa jurnal (J 01 s.d. J 98) untuk memastikan kebenaran dalam pembebanan kode akun.
5. Mengevaluasi Laporan Keuangan UPT dan UJT untuk proses konsolidasi laporan keuangan.

6. Memeriksa laporan keuangan Region beserta lampirannya untuk mengetahui kinerja keuangan.
7. Memantau aplikasi akuntansi biaya yang berbasis pada aktivitas untuk menghitung biaya per level tegangan.
8. Memeriksa usulan penarikan aktiva operasi menjadi tidak operasi untuk proses pemindahan status aktiva.
9. Mengusulkan penyelesaian permasalahan yang dihadapi sub bidang akuntansi untuk bahan pengambilan keputusan manajemen.
10. Mengimplementasikan dan meningkatkan perbaikan secara berkesinambungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 dilingkungannya.
11. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
12. Menyusun laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

PT. PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang kelistrikan di Cimahi. PT. PLN (Perseo) Area Pelayanan Jaringan telah memiliki pengalaman lebih dari lima puluh tahun dalam bisnis kelistrikan dan saat ini sudah

menjadi market leader dan mempunyai brand image kuat di masyarakat dalam hal kebutuhan listrik. Bidang usaha utama PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi adalah memberikan pelayanan jasa listrik kepada masyarakat umum, industriawan dan pembisnis disamping membentuk atau perolehan atas laba. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 17 tanggal 28 mei 1990 pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa sifat PLN adalah menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip akuntansi.

Selain memberikan pelayanan yang baik serta memberikan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keadaan yang baik, masih ada pelayanan lain yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan yaitu perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenaga listrik yang disalurkan juga penambahan daya serta sambungan sementara yang merupakan sambungan tegangan rendah yang di peruntukan bagi penyambungan atas penambahan daya jangka pendek, seperti pasar malam, pesta dan keperluan khusus. Sedangakan lapangan usaha PT. PLN (Persero) berdasarakan peraturan pemerintah No. 17 tanggal 28 mei 1990 pasal 6 adalah sebagai berikut :

> ”Dengan mengindahkan prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, PT. PLN (Persero) menyediakan tenaga listrik yang meliputi kegiatan pembangkitan, transmisi dan pembangunan tenaga listrik.”

Di dalam mengusahakan tenaga listrik PT. PLN (Persero) mempunyai tiga sasaran, yaitu :

1. Meningkatkan jumlah pelanggan

2. Meningkatkan daya terpasang
3. Meningkatkan jumlah penjualan KWH (satuan tenaga listrik) kepada pelanggan

Di dalam melaksanakan aktivitasnya, PT. PLN (Persero) mempunyai beberapa kegiatan operasional yang terdiri dari :

1. Pelayanan kepada pelanggan
    a. Permintaan sambungan dan penambahan daya
    b. Permintaan ganti nama atau tarif
    c. Permintaan atau pengembangan sambungan rumah
    d. Permintaan penerangan sementara
2. Pemeliharaan rutin terhadap gardu, jaringan sambungan rumah, gedung dan kabel-kabel
3. Pembacaan meter, melaksanakan pencatatan stad meter atas pemakaian tenaga listrik
4. Pembuatan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik
5. Pembukuan tenaga listrik
6. Penerimaan pelunasan atau pembayaran rekening listrik
7. Pengawasan tunggakan rekening listrik dan tindak lanjut.

4.1.2 Perputaran Piutang pada PT. PLN (Persero)

Perputaran piutang merupakan kas yang diterima oleh PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi yang berasal dari pembayaran piutang hasil dan transaksi penjualan secara kredit. Pengukuran yang memadai dari perputaran piutang

tersebut dapat dinilai dari berapa kali piutang yang ada dapat berubah menjadi kas, hal tersebut dapat dihitung dengan membagi total penjualan tenaga listrik dengan jumlah piutang rata-rata tenaga listrik pada PT. PLN (Perseo) Area Pelayanan Jaringan Cimahi yang dapat tertagih dalam satu tahun tersebut. Penjualan kredit tidak segera menghasilkan penerimaan kas, tetapi menimbulkan piutang dan waktu jatuh tempo terjadi aliran kas masuk yang berasal dari pengumpulan piutang tersebut. Dengan demikian maka piutang merupakan elemen modal modal kerja yang juga dalam keadaan selalu berputar secara terus menerus, yaitu dari kas menjadi persediaan kemudian persedian tersebut dijual secara kredit berupa penjualan tenaga listrik sehingga menimbulkan adanya piutang, yang apabila piutang tersebut dibayar oleh pelanggan atau konsumen maka secara otomatis akan menjadi kas. Piutang adalah hak yang dimiliki PLN yang mewajibkan penanggung hutang untuk memenuhi kewajiban melunasi tagihan dalam jumlah rupiah dan dalam waktu 1 atau kurang dari 1 tahun yang ditentukan dalam hak dan kewajiban tersebut.

Piutang PT. PLN (Persero) yang dimaksud adalah piutang pelanggan dan piutang lainnya yang bukan pelanggan. Jika sampai pada saat piutang tersebut jatuh tempo tidak dilunasi oleh penanggung hutang sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian, peraturan atau sebab apapun yang menimbulkan piutang, maka hal ini dapat menimbulkan piutang macet.

Dengan mengetahui seberapa besar perputaran piutang yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi maka akan dapat diketahui kinerja perusahaan, karena dengan tingkat perputaran piutang yang tinggi maka akan

semakin mempercepat tingkat perubahan aktiva non kas yang berbentuk piutang menjadi kas. Sehingga hal tersebut akan memperkecil kemungkinan tingkat piutang yang tidak tertagih dengan pendeknya jangka waktu penagihan piutang dan dapat mengurangi tingkat kesalahan perusahaan dalam menentukan perkiraan laba perusahaan dimana aktiva lancar perusahaan yang berupa piutang akan dapat berubah menjadi kas.

Data yang dipergunakan dalam menunjang proses analisis perputaran piutang pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi bersumber pada data laporan keuangan yang berbentuk laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam penggunaan laporan keuangan tersebut penulis menggunakan data penjualan dan aktiva lancar pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi selama tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2007-2009. Seiring dengan meningkatnya penjualan pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi maka penjualan secara kredit pun akan meningkat, hal tersebut dikarenakan pembayaran sebagian besar dilakukan secara kredit. Walaupun transaksi penjualan kredit dilakukan dengan jangka waktu yang pendek, tetapi banyaknya transaksi penjualan kredit tidak menutup kemungkinan adanya suatu piutang yang tidak terbayar akibat ketidakmampuan pelanggan dalam melunasi hutangnya.

Untuk mengetahui tingkat perputaran piutang maka diambil data penjualan yang berupa pendapatan usaha dan piutang rata-rata yang berupa piutang usaha yang berasal dari laporan neraca dan laporan laba rugi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi. Dengan adanya data tersebut maka dapat dihitung

perputaran piutang pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi yaitu sebagai berikut :

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Penjualan Tenaga Listrik}}{\text{Piutang rata-rata}}$$

$$\text{Piutang Rata-Rata} = \frac{\text{Saldo Awal Tahun} + \text{Saldo Akhir Tahun}}{2}$$

Dari rumus diatas, maka dapat dihitung perputaran piutang yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 2007

   a. Total Penjualan : 1.080.351.313.445

   b. Piutang Rata-rata : $\frac{6.676.841.427 + 8.852.931.831}{2}$

   : 7.764.886.629

   b. Perputaran Piutang (a / b) : 139,13 Kali

   (Perputaran piutang sebesar 139,13 menggambarkan jumlah kas yang mungkin akan diterima oleh perusahaan sebanyak 139,13 dalam tahun tersebut).

2. Tahun 2008

   a. Total Penjualan : 1.153.420.476.688

   b. Piutang Rata-rata : $\frac{8.852.931.831 + 10.821.265.054}{2}$

   : 9.837.098.441

   c. Perputaran Piutang (a / b) : 117,25 Kali

   (Perputaran piutang sebesar 117,25 menggambarkan jumlah kas yang mungkin akan diterima oleh perusahaan sebanyak 117,25 dalam tahun tersebut).

3. Tahun 2009

   a. Total Penjualan : 1.167.202.209.463

b. Piutang Rata-rata : $\frac{10.821.265.054 + 5.605.457.416}{2}$

: 8.213.361.233

c. Perputaran Piutang (a / b) : 142,11 Kali

(Perputaran piutang sebesar 142,11 menggambarkan jumlah kas yang mungkin akan diterima oleh perusahaan sebanyak 142,11 dalam tahun tersebut).

4.1.3 Periode Rata-Rata Pengumpulan Piutang pada PT. PLN (Persero)

Periode rata-rata pengumpulan piutang merupakan periode yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang perusahaan tersebut. Rumus yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut :

$$\textit{Average collection period} = \frac{\text{Piutang listrik x 360}}{\text{Penjualan tenaga listrik}}$$

Perhitungan periode rata-rata pengumpulan piutang PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi adalah sebagai berikut :

a. Tahun 2007 = $\frac{7.764.886.629 \text{ x } 360}{1.080.351.313.445}$

= 2, 58 Hari

b. Tahun 2008 = $\frac{9.837.098.441 \text{ x } 360}{1.153.420.476.688}$

= 3, 07 Hari

c. Tahun 2009 = $\frac{8.213.361.233 \text{ x } 360}{1.167.202.209.463}$

= 2, 53 Hari

Rekapitulasi piutang, penjualan tenaga listrik dan periode rata-rata pengumpulan piutang PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi periode 2005 hingga 2009 adalah sebagai berikut :

TAHUN	PIUTANG	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	PERIODE RATA-RATA PENGUMPULAN PIUTANG
2007	7.764.886.629	1.080.351.313.445	2, 58 Hari
2008	9.837.098.441	1.153.420.476.688	3, 07 Hari
2009	8.213.361.233	1.167.202.209.463	2, 53 Hari

Table diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2007 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 2, 58 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih lambat dari tahun 2006. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2006.
2. Pada tahun 2008 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 3,07 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih lambat dari tahun 2007. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2007.
3. Pada tahun 2009 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 2, 53 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih cepat dari tahun 2008. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2008.

Selama ini angka tunggakan rekening listrik menjadi masalah dan kerap dihadapi PT. PLN (Persero), oleh karena itu PT. PLN (Persero) Area Pelayanan

jaringan Cimahi menerapkan beberapa cara untuk menekan tunggakan rekening listrik, yaitu :

1. Membuat tim penurunan tunggakan yang bertugas mengimpentarisir bulan tunggakan.
2. Melaksanakan pemutusan listrik kepada pelanggan secara langsung dengan pelanggan yang tunggakannya paling tinggi tiga bulan.
3. Menarik asset-aset milik PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi yang ada pada pelanggan, seperti KWH meter, kabel dan yang lainnya.
4. Membuat surat pemberitahuan (Berita acara) bahwa pelanggan tersebut harus menyelesaikan tunggakan dan apabila tidak diselesaiakan, pihak PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi akan membongkar keseluruhan asset-asset PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Perputaran Piutang pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi

Perputaran piutang dalam suatu perusahaan sangatlah baik apabila dalam pelaksanaannya tidak mengalami masalah seperti adanya kemacetan pembayaran atau telatnya membayar. Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui dalam perputaran piutang pada PT. PLN (persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi selama tiga tahun 2007-2009 mengalami fluktuasi, fluktuasi tersebut berupa kenaikan dan penurunan perputaran piutang rata-rata dalam hal ini piutang usaha, yaitu sebagai berikut :

TAHUN	PENJUALAN	PIUTANG	PERPUTARAN PIUTANG
2007	1.080.351.313.445	7.764.886.629	139,13 Kali
2008	1.153.420.476.688	9.837.098.441	117,25 Kali
2009	1.167.202.209.463	8.213.361.233	142,11 Kali

Adapun penjelasan dari table diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2007 perputaran piutang terjadi sebanyak 139,13 kali, menggambarkan jumlah kas yang akan diterima oleh perusahaan sebanyak 139,13 kali dengan jumlah penjualan sebesar 1.080.351.313.445 dan jumlah piutang sebesar 7.764.886.629.
2. Pada tahun 2008 perputaran piutang terjadi sebanyak 117,25 kali, menggambarkan jumlah kas yang akan diterima oleh perusahaan sebanyak 117,25 kali. Perputaran piutang pada tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun 2007 dengan jumlah penjualan sebesar 1.153.420.476.688 dan jumlah piutang sebesar 9.837.098.441. Penurunan tersebut dikarenakan kurang efektifnya bagian penagihan piutang sehingga mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2007.
3. Pada tahun 2009 perputaran piutang terjadi sebnyak 142,11 kali, menggambarkan jumlah kas yang akan diterima oleh perusahaan sebanyak 142,11 kali. Perputaran piutang pada tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008 dengan jumlah penjualan sebesar 1.167.202.209.463 dan jumlah piutang sebesar 8.213.361.233. kenaikan tersebut dikarenakan efektifnya bagian penagihan piutang sehingga

mempengaruhi keberhasilan penagihan piutang. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2008.

Jumlah perputaran piutang selama periode tersebut adalah (398,49 / 3) adalah 132,83 kali. Perputaran piutang yang terjadi dari perhitungan tahun 2007 hingga 2009 yaitu 132,83 kali yang setiap bulannya menjadi (132,83 / 12) 11,06 kali, sehingga membuktikan perputaran piutang yang terjadi pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi cukup baik, dan membuktikan bahwa bagian penagihan piutang bekerja dengan cukup baik. Dengan hasil perputaran piutang yang tinggi, tentu saja dapat meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan mendapatkan laba untuk perusahaan yang dikarenakan perputaran piutang yang berjalan sudah cukup baik.

4.2.2 Analisis Periode Rata-Rata Pengumpulan Piutang pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan jaringan Cimahi

Periode terikatnya modal dalam piutang atau periode rata-rata pengumpulan piutang adalah penting untuk membandingkan periode rata-rata dengan syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jumlah hari penjualan dalam piutang merupakan estimasi jangka panjang waktu piutang yang belum tertagih. Perbandingan ukuran ini dengan syarat kredit akan menghasilkan informasi mengenai efisiensi dalam penagihan piutang. Apabila periode rata-rata pengumpulan piutang lebih besar dari pada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan tersebut, berarti

bahwa cara pengumpulan piutang kurang efisien dan berarti banyak para pelanggan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan analisis perputaran piutang dapat dilihat periode rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2007 hingga 2009 pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi adalah sebagai berikut :

TAHUN	PIUTANG	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	PERIODE RATA-RATA PENGUMPULAN PIUTANG
2007	7.764.886.629	1.080.351.313.445	2, 58 Hari
2008	9.837.098.441	1.153.420.476.688	3, 07 Hari
2009	8.213.361.233	1.167.202.209.463	2, 53 Hari

Adapun penjelasan dari table diatas, adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2007 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 2, 58 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih lambat dari tahun 2006, dengan jumlah piutang sebesar 7.764.886.629 dan penjualan tenaga listrik sebesar 1.080.351.313.445. Perubahan tersebut karena transaksi-transaksi yang mempengaruhi piutang diantaranya mutasi penambahan dan pengurangan pelanggan, pencatatan meter dan pembuatan rekening, penjualan rekening, penerimaan kas dari pelunasan piutang pelanggan dan pengahapusan piutang pelanggan akibat piutang tak tertagih. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2006.
2. Pada tahun 2008 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 3,07 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih lambat dari tahun 2007, dengan jumlah piutang sebesar 9.837.098.441 dan penjualan tenaga listrik sebesar

1.153.420.476.688. Perubahan tersebut karena transaksi-transaksi yang mempengaruhi piutang diantaranya mutasi penambahan dan pengurangan pelanggan, pencatatan meter dan pembuatan rekening, penjualan rekening, penerimaan kas dari pelunasan piutang pelanggan dan pengahapusan piutang pelanggan akibat piutang tak tertagih. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2007.

3. Pada tahun 2009 periode rata-rata pengumpulan piutang adalah 2, 53 hari. Periode rata-rata pengumpulan piutang lebih cepat dari tahun 2008, dengan jumlah piutang sebesar 8.213.361.233 dan penjualan tenaga listrik sebesar 1.167.202.209.463. Perubahan tersebut karena transaksi-transaksi yang mempengaruhi piutang diantaranya mutasi penambahan dan pengurangan pelanggan, pencatatan meter dan pembuatan rekening, penjualan rekening, penerimaan kas dari pelunasan piutang pelanggan dan pengahapusan piutang pelanggan akibat piutang tak tertagih. Hal ini mengidentifikasikan mengenai efisiensi dalam penagihan piutang dibandingkan tahun 2008.

Untuk mengungkapkan hubungan antara penjualan kredit dan piutang usaha, jumlah hari penjualan dalam piutang merupakan estimasi jangka waktu piutang usaha yang belum tertagih. PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan penyedia layanan jasa dengan penjualan tenaga listrik melalui system *accrual basic,* sehingga melalui perbandingan ukuran ini. Dengan syarat kredit akan menghasilkan informasi mengenai efisiensi dalam penagihan piutang. Dalam periode rata-rata pengumpulan

piutang, masalah yang timbul dari adanya penunggakan yang dikarenakan terlambatnya membayar hingga ketidakmampuan dalam melunasi hutang kepada perusahaan, akan mengakibatkan perputaran piutang yang tidak cukup efektif. Apabila tidak efektif atau tidak sesuai dengan penjualan tentu saja akan berdampak buruk bagi perusahaan, yaitu dalam kinerja perusahaan.

Oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki manajemen yang baik dan tegas terutama dalam hal penagihan piutang. Disini PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan Cimahi sudah melakukan tugas dalam penagihan piutang dengan cukup baik, yaitu dengan cara menekan tunggakan rekening listrik seminim mungkin seperti membuat tim penurunan tunggakan yang memberikan tugas khusus ke beberapa karyawan dalam hal penagihan piutang, melaksanakan pemutusan listrik sementara, membuat surat pemberitahuan hingga menarik atau membongkar semua asset milik perusahaan. Dengan cara itu PT. PLN (Persero) Area Pelayanan jaringan Cimahi berharap dalam perputaran piutang yang terjadi setiap tahunnya dapat berjalan efektif sehingga tidak akan berdampak buruk bagi perusahaan.